

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang terbentang luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan pulau yang kecil. Sebagai negara yang mempunyai berbagai daerah, tentunya tiap-tiap daerah tersebut mempunyai kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain.

Adat istiadat biasanya berkembang lama dalam masyarakat dan karena sudah berkembang lama dalam masyarakat, maka dengan sendirinya menjadi suatu sulit diubah atau ditinggalkan. Selain itu, kenyataan sosial dalam masyarakat terdapat pula pola-pola perilaku kelompok masyarakat tertentu yang tidak sejalan dengan budaya tertentu.

Kebiasaan membawa senjata tajam timbul karena lingkungan sosial yang membentuk kepribadian atau karakter masyarakat pada wilayah atau daerah tertentu, bahkan merupakan ciri khas serta identitas bagi masyarakat yang menganutnya, sehingga sangat sulit untuk menghilangkannya tanpa melalui prosedur penanggulangan yang terpadu dari aparat penegak hukum dan semua pihak.

Kebiasaan membawa senjata tajam oleh sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Jawa Barat bukanlah merupakan suatu hal yang tabu melainkan suatu kebiasaan. Kebiasaan membawa senjata tajam ini mengingat keadaan masyarakat yang juga masih menjunjung adat istiadat dan

kebiasaan lama yang tumbuh berkembang di lingkungannya sekalipun tidak dinafikan bahwa sebagian masyarakat itu juga merasa perlu membawa senjata tajam untuk kepentingan diri sendiri.

Namun tak jarang dari beberapa alasan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh masyarakat seperti untuk tetap menjaga eksistensi adat dan kebiasaan masyarakat, juga untuk mempertahankan diri. Dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, biasanya sekaligus tumbuh pula berbagai nilai dan norma sosial yang baru, dan dapat mengakibatkan bergesernya ukuran-ukuran taraf kehidupan tertentu, yang kemudian menjadi suatu kelaziman bagi masyarakat.

Meningkatnya perkembangan dan pembangunan tidak dapat dipungkiri sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan individu maupun kelompok seringkali terjadi degradasi moral akibat berbagai macam perilaku yang jauh dari nilai, moral, dan norma yang mengakibatkan penurunan harkat dan martabat manusia, karena kualitas kemanusiaan selalu berkenaan dengan penerapan nilai, norma, dan moral. Perubahan sikap, tingkah laku, dan pola pikir setiap orang berbeda-beda. Perbedaan yang terjadi akhirnya menjadi permasalahan di antara masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang muncul sangatlah kompleks. Tidak jarang masalah tersebut berakhir dengan perselisihan, perkelahian, bahkan pembunuhan.

Menurut Sudarto:¹

¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 107.

“Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Kejahatan melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan seperti tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih mendalam pada penyimpangan dan kejahatan. Kejahatan ini berupa perbuatan manusia”.

Manusia pada hakekatnya memiliki keinginan untuk hidup dalam rasa aman dan tentram, maka banyak warga masyarakat atau warga sipil yang dengan berbagai cara untuk melindungi diri, salah satu upaya yang dilakukan warga masyarakat adalah dengan memiliki alat perlindungan diri yaitu senjata tajam.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Indonesia adalah negara hukum”, hal ini dapat diartikan bahwa kekuasaan negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum, jadi negara berhak untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, yang mengakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam praktiknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.

Mengenai persoalan penegakan hukum adat Indonesia, sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bangsa, dan identitas tiap daerah, sehingga dalam Pasal 28 Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

“Hakim harus melihat atau mempelajari kebiasaan atau adat setempat dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang berkaitan dengan adat setempat”.

Hukum adat selama ini diproteksi (disebut hukum tidak tertulis) yang dalam praktiknya sulit diterapkan dalam praktik tatanan hukum nasional, baik dalam beracara di peradilan maupun dalam bertatanegara. Padahal apabila ditarik rumusan umumnya dapat dituangkan dalam kaidah hukum nasional, seperti halnya hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan hukum sipil Belanda (Unifikasi dan Kodifikasi).

Nilai-nilai adat istiadat budaya luhur (Kearifan Lokal, Hukum Tidak Tertulis) yang dimiliki bangsa Indonesia telah tumbuh dan bertahan membumi, sebagai sistem nilai sudah seharusnya ditempatkan pada tataran yang ideal dan tinggi, karena mampu membangun ketahanan adat budaya bangsa di Bumi Pertiwi dari jajahan mental dan segala bentuk pengurasan serta penindasan adat budaya lain. Karenanya jangan mengisolasi diri dalam perkembangan ketatanegaraan dan kompetensi kekuasaan peradaban baru, karena sejarah dan ilmu antropologi memperlihatkan bahwa tidak ada satu kebudayaanpun di dunia ini yang bisa berkembang subur dengan isolasionisme.

Oleh karena itu kita sebagai masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat budaya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya bangsa, harus

bersifat terbuka karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, tidak ada pilihan lain dalam menghadapi era globalisasi, hendaknya semangat berjuang dan bertahan agar Hukum Adat berperan serta dalam berbangsa, bernegara dan bertatanegara.

Masyarakat sunda sebagai bagian terbesar dari masyarakat Jawa Barat di Indonesia, sudah membuktikan diri sebagai penyumbang terbesar untuk kemajuan Bangsa Indonesia, dengan memiliki dan tetap berupaya melestarikan, mempertahankan serta mengembangkan nilai-nilai yang menjadi citra identitas suatu bangsa (*local genius*), yang berkaitan erat dengan otentisitas perilaku/visi hidup masyarakat pendukung budaya lokal tersebut, yang berarti bahwa setiap individu yang berada di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat (daerah sunda khususnya) mempunyai kualitas jati diri yang bercitra identitas otentik sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya (sebagai masyarakat pendukung budayanya).

Masyarakat Jawa Barat (Masyarakat Lingkungan Hukum Adat Sunda dan Priangan), sangat mengenal kujang sebagai barang atau benda pusaka yang sangat dihormati, bahkan Kujang dijadikan simbol khusus dalam upacara serah terima jabatan Panglima KODAM III SILIWANGI.

Memang kujang untuk sebagian besar Masyarakat sunda, seiring perkembangan jaman, lebih dikenal sebagai senjata ciri khas masyarakat sunda, karena melihat bentuk dan rupanya yang tajam dan terbuat dari bahan besi, sehingga ketika terjadi suatu Tindak Pidana dengan membawa kujang, selalu diterapkan dan atau diberlakukan ketentuan tentang senjata tajam, dan

terhadap kujang ditetapkan sebagai barang bukti tindak pidana yang akibatnya di Negara Republik Indonesia, keberadaan kujang mengakibatkan Sanksi Pidananya menurut pada ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam.

Menurut Wikipedia:²

“Senjata tajam merupakan alat kepanjangan tangan manusia dalam pembelaan diri, dalam setiap perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan lingkungan alam dan Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan”.

Oleh karenanya sering ditemukan kesamaan model senjata antara satu daerah dengan daerah lain yang letak geografisnya berdekatan. Tidak sedikit dari senjata-senjata itu berakar dari alat pertanian dan perkakas sehari-hari, proses asimilasi dan transformasi kebudayaan pada suatu daerah, yang meski letak geografis saling berjauhan, memegang peranan yang cukup penting dalam perkembangan model senjata tradisional.

Kebiasaan membawa Kujang ini mengingat keadaan masyarakat yang juga masih menjunjung adat istiadat dan kebiasaan lama yang tumbuh berkembang di lingkungannya sekalipun tidak dinafikan bahwa sebagian masyarakat itu juga merasa perlu membawa senjata tajam untuk kepentingan diri sendiri. Terdapat dampak negatif yang akan terjadi jika masyarakat membawa senjata tajam, tanpa disadari dampak negatif jika masyarakat membawa senjata tajam adalah mereka akan berurusan dengan pihak aparat kepolisian, belum lagi yang awalnya senjata tajam hanya untuk dipakai

²<http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 16.10 WIB

sebagai pelindung diri tapi pada akhirnya senjata tajam digunakan untuk kepentingan lain seperti untuk membunuh orang dan sebagai gaya-gayaan.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Yang dimaksud dengan “senjata tajam” adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib”.

Kepemilikan senjata tajam secara melawan hukum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Undang-Undang Republik Indonesia yang lalu Nomor 8 Tahun 1948. Dalam Pasal 2 ketentuan tersebut menjelaskan bahwa:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata- nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Penelitian yang akan penulis lakukan berkaitan dengan kasus tindak pidana yang terjadi di Kawasan Wisata Gunung Tangkuban Perahu

Kabupaten Subang, yaitu seseorang yang memiliki kebiasaan membawa kujang, memasuki area tersebut tidak membayar tiket, sehingga terjadi keributan dengan Pengelola kawasan wisata tersebut. Atas peristiwa tersebut telah diproses penyidikan oleh Kepolisian Resort Subang, dan perkaranya dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Subang dengan Perkara Nomor No. 259/Pid.B/2011/PN.Subang. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mendakwa terdakwa dengan dakwaan Alternatif atau pilihan, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau Pasal 335 KUHPidana tentang perbuatan tidak menyenangkan, dengan menetapkan kujang sebagai Barang Bukti.

Dakwaan alternatif dibuat dalam 2 hal menurut Bemmelen, yaitu sebagai berikut:³

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan.
2. Jika penuntut umum ragu, peraturan pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atau yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Hendar Soetomo mengatakan:⁴

“Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

⁴Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2017, hlm. 9.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita mengatur dengan jelas alat bukti yang sah dan yang diakui oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:⁵

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan setelah pemeriksaan saksi-saksi dan ahli terungkap fakta bahwa terhadap Barang Bukti Kujang tidak dapat diberlakukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, seperti diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No.REG.PERK: PDM-92/SUBANG/08/2011, tertanggal 23 November 2011, yang pokoknya Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dan memberikan pendapat hukumnya bahwa barang bukti kujang merupakan identitas budaya sunda, ciri khas bangsa sunda dan kujang disakralkan oleh sebagian besar masyarakat sunda.

Berdasarkan pendapat hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata dan menyatakan barang bukti kujang milik Terdakwa diserahkan kepada Pemerintah untuk dirawat sebagaimana mestinya dan agar tidak disalahgunakan.

⁵*Ibid*, hlm. 47.

Dengan adanya pendapat hukum dari Jaksa Penuntut Umum tentang barang bukti kujang tersebut, membuktikan adanya pengakuan Negara bahwa Kujang bukan merupakan Senjata sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak dapat diberlakukan terhadap kujang, yang merupakan Pusaka Bangsa Sunda.

Pada tahun 2010 terdakwa pernah dipidana di Pengadilan Negeri Subang dengan Perkara Pidana Nomor 40/Pid.B/2010/PN.Subang terkait perkara yang sama yaitu dengan dakwaan alternatif membawa kujang yang dipergunakan untuk kegiatan diluar kegiatan adat atau penganiayaan ringan melempar botol air mineral. Dalam putusan Pengadilan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk. Sehingga Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mencoba meneliti dan membahas lebih jauh lagi masalah Kujang sebagai Barang Bukti Tindak Pidana, dalam penelitian penulis berjudul “BARANG BUKTI KUJANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM MENURUT UU NO.12/DRT/1951 TENTANG SENJATA TAJAM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, penulis telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah barang bukti kujang termasuk senjata tajam yang dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam?
2. Bagaimana hakim memutus perkara dengan dakwaan membawa senjata tajam yang berupa kujang?
3. Bagaimana seharusnya aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum bertindak terhadap orang yang membawa kujang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bahwa barang bukti kujang termasuk yang barang bukti yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan dakwaan membawa senjata tajam yang berupa kujang.
3. Untuk mengetahui tindakan aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum dalam bertindak terhadap orang yang membawa kujang.

D. Kegunaan Penelitian

Bertolak pada tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan nilai guna atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Adanya suatu harapan bahwa dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan sebagai upaya pengembangan ilmu serta dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan senjata tajam khususnya Kujang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum pidana atau aparat penegak hukum (Mahkejapol) yaitu Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama penegak hukum. Terutama dalam penegakan hukum dan penemuan hukum tentang senjata tajam khususnya Kujang.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:⁶

⁶Muh.Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, hlm. 27.

“Negara Indonesia adalah negara Hukum, sehingga pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam doktrin tujuan pokok hukum adalah ketertiban”.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:⁷

“Kepatuhan terhadap ketertiban dan pergaulan antara manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum”.

Menurut Mochtar kusumaatmadja:⁸

“Bahwa hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang didalamnya meliputi lembaga dan dan proses-proses yang dapat mewujudkan kaidah-kaidah itu dalam kenyataan”.

Selanjutnya menurut Muljatno:⁹

“Sebagaimana pengertian hukum menurut Mochtar kusumaatmadja, maka hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebagai hukum yang bersifat publik, Hukum pidana memiliki arti penting sebagai suatu aturan hukum yang tegas dan dapat menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan. Di dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan syarat-syarat ppidanaan tersebut dapat dijatuhkan”.

Kepastian hukum dalam aspek kegiatan masyarakat mewajibkan negara untuk membuat produk hukum yang berfaedah bagi setiap warga negaranya.

⁷Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 1.

⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan*, Nasional Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 15.

⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Intermasa, Jakarta, 2000, hlm.1.

Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam alinea ke empat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Menurut Kaelan:¹⁰

“Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Andi Hamzah menyatakan bahwa:¹¹

“Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam berbicara tentang hukum pidana. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan”.

P.A.F Lamintang menyatakan:¹²

“Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar faith* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sesuatu dari sesuatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan kenyataan, perbuatan atau tindakan”.

¹⁰Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 169

¹¹Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

¹²P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

Menurut Moeljatno:¹³

“Istilah *strafbaar faith* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum atau perbuatan yang di larang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidanan yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menumbukan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, maka orang tersebut disebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana, dengan begitu, aturan atau larangan dan ancaman saling hubungan yang erat, sehingga antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat.

Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditunjukan pada perbuatan, yaitu suatu

¹³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 59.

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Moeljatno:¹⁴

“Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana”.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia, yaitu tindak pidana dengan membawa dan atau menggunakan senjata tajam. Peristiwa pidana yang dibarengi dengan senjata di Indonesia, dalam prakteknya akan dituntut disamping perbuatannya juga senjatanya, dan senjata tersebut akan ditetapkan sebagai Barang Bukti, artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan membawa senjata, kepadanya akan diterapkan tentang perbuatannya diberlakukan KUHPidana, dan terhadap Barang Bukti Senjatanya akan diberlakukan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menurut penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerja rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib”.

¹⁴*Ibid*, hlm. 155.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan.

KUHPidana jelas merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang Perbuatan yang dilarang di Indonesia, baik pelanggaran maupun kejahatan, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang Larangan membawa, memiliki, menyimpan dan atau menggunakan suatu benda yang dapat disebut Senjata yang dapat diduga membahayakan orang lain. Dengan adanya undang-undang yang mengatur segala tindakan yang dilarang, baik yang mengatur Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus, tentunya merupakan jaminan kepastian hukum dari Negara untuk melindungi Masyarakat, karenanya asas kepastian hukum merupakan asas krusial dalam tatanan hukum di Indonesia.

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum.

Asas kepastian hukum menurut salah satu ahli:¹⁵

¹⁵Asas Kepastian Hukum. <http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

“Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain”.

Menurut Van Apeldoorn:¹⁶

“Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret”.

Menurut H. Ridwan Syahrani:¹⁷

“Di samping itu kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang”.

Untuk menjamin terlaksana dan dirasakannya asas kepastian hukum, disamping Pembentuk undang-undang, Negara telah secara tegas telah menentukan Aparatur Penegak Hukum, baik Hakim, Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Badan lainnya, yang berfungsi dan berwenang menjalankan Undang-undang. Jaksa Penuntut Umum dalam fungsi untuk melindungi kepentingan umum atas nama Negara, memiliki peran yang sangat prinsip,

¹⁶Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paamita, Jakarta, 1990, hlm. 24-25.

¹⁷H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 124

disamping untuk menjamin tegaknya hukum di Indonesia atas perbuatan-perbuatan yang dapat diduga merupakan ancaman kepada umum, juga menjamin kepastian hukum.

Peran Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana dengan dugaan membawa senjata tajam dan menjadikannya sebagai Barang Bukti, haruslah dapat memberikan dakwaan dengan benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada namun sebelum melakukan penuntutan, seorang Jaksa Penuntut Umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi syarat formal dan materiil, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum akan menyusun Surat Dakwaan.

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena setiap dakwaan yang diberikan jaksa akan dipertimbangkan dengan benar oleh hakim sehingga dapat memberikan kebenaran dan keadilan terhadap Terdakwa. Pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan tidaklah dapat disangkalkan penyusunannya, sehingga akan dapat menyebabkan lepasnya si Terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri. Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Dari

berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan rumusan dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan dan sejauh apa saja yang didakwakan.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili. Di luar lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan Terdakwa. Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan. Syarat surat dakwaan telah diatur pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Jaksa Penuntut Umumlah yang berkewajiban membuktikan dakwaannya dan oleh karena itu ia terikat pada uraian fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Penulis berpendapat bahwa surat dakwaan adalah sangat penting artinya fungsi dan peranannya dalam proses peradilan pidana karena surat dakwaan ikut menunjang usaha untuk mencapai keadilan dipandang dari sudut hukum.

Hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam proses peradilan dapat menjalankan peranannya, maka cita-cita pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman akan dapat terwujud. Hakim dalam proses

peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil putusan hakim harus mandiri dan bebas dari pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum saja, tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan. Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara dalam bingkai hukum dan keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto yaitu:¹⁸

“Penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat objek penelitian itu sendiri”.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Yuridis normatif menurut Soejorno Soekanto yaitu:¹⁹

“Suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum”.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dapat dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder dalam hukum primer, sekunder, maupun tersier. Data sekunder yang umum dapat diteliti adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan hasil pengamatan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait dengan upaya yang dilakukan

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 14.

¹⁹*Ibid.*, hlm 17.

Jaksa Penuntut Umum dalam mengeluarkan surat dakwaan terhadap pelaku kejahatan.

b. Data sekunder

Data-data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, dengan cara *Library Research* (kepustakaan).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyatakan bahwa:²⁰

“Dalam suatu penelitian ini mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder (yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tertier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder)”.

3. Tahap Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian yaitu:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm. 39.

dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penulisan ini , penulis data sekunder berupa :

- a) Bahan hukum primer Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa ensiklopedia, Koran, internet, dan majalah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksud untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²¹

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah gejala-gejala yang diteliti. Gejala-gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sebagaimana juga dengan hasilnya juga disebut data.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

5. Alat Pengumpul data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara mengintervensi bahan-bahan buku berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang rinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat

²¹*Ibid.*, hlm 25.

perekaman seperti handpone atau tape recorder dan dituangkan kedalam tulisan.

6. Analisis Data

Proses penelitian Pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis atau menggambarkan data hasil penelitian dilapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap tentang aspek yang berkaitan dengan masalah berdasarkan literatur dan data lapangan. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan. Kemudian pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskripsi, sistematis, dan eksplanasi.

7. Lokasi penelitian

Guna mempermudah penelitian dalam hal pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yaitu :

a. Perpustakaan

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan
Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Galuh Pakuan Padjadjaran Jalan
Mohamad Toha – Pungkur Kota Bandung Gedung ITC Kebon Kalapa
Menara 2 Bandung.